II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan Ekonomi

H.F Williamson (Todaro, 1983:4) Pembangunan ekonomi meliputi usaha suatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat, sedangkan keseluruhan usaha-usaha pembangunan juga meliputi usaha-usaha pembangunan sosial, politik, menggunakan sumberdaya produksi sedemikian rupa, sehingga dapat memperbesar dan kebudayaan. Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses , dimana suatu Negara dapat produk perkapita Negara tersebut.

Meier dan Baldwin (Winardi, 1983:6) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu proses, dimana pendapatan nasional nyata suatu Negara meningkat dalam jangka panjang.

Sumitro Djojohadikusumo (1985:39) juga berpendapat bahwa pembangunan ekonomi juga didefinisikan sebagai suatu usaha untuk memperbesar pendapatan perkapita dan meningkatkan produksi dengan jalan menambah peralatan modal serta meningkatkan keahlian. Karena suatu kemajuan tidak hanya diukur dengan pendapatan perkapita melainkan juga produktivitasnya.

Irawan dan Suparmoko (1987:29) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah:

1. Mencapai kenaikan yang cepat daripada pendapatan perkapita

2. Menyediakan kesempatan kerja yang cukup
3. Mengusahakan pembagian pendapatan supaya lebih merata
4. Mengurangi perbedaan dalam tingkat perkembangan atau pembangunan dan kemakmuran antar daerah yang satu dengan yang lainnya.
5. Merubah struktur perekonomian supaya tidak berat sebelah

B. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM / *Human Development Index (HDI)* adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, angka melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara dikatakan maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks ini pada tahun 1990 dikembangkan oleh pemengang nobel India Amartya Sen dan Mahbub Ul Haq seorang ekonom Pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari *Yale University* dan Lord Meghnad Desai dari *London School of Economics.* Sejak itu dipakai oleh program pembangunan PBB pada laporan HDI tahunannya. Digambarkan sebagai pengukuran yang vulgar oleh Amartya Sen karena batasannya. Indeks ini lebih fokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan per kapita yang selama ini digunakan. Dan indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.

Budiono Sri Handoko (2001) mengatakan HDI mengukur penciptaan rata-rata sebuah negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu:

1. Hidup sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat lahir.

2. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat rata-rata melek huruf dikalangan penduduk dewasa (bobotnya dua per tiga).
3. Kualitas standar hidup layak yang diukur dengan pendapatan per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli *(purchasing power parity).*

HDI atau IPM tidak saja berdasarkan angka pendapatan riil tetapi juga mencakup indikator sosial seperti: harapan hidup, tingkat melek huruf penduduk dewasa dan berapa tahun memperoleh pendidikan. Latar belakang HDI adalah mencari indikator yang lebih "memuaskan" dari sekedar pertumbuhan produksi nasional. Yang penting adalah bagaimana pertumbuhan itu dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

C. Konsep Umum Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun dari tiga variabel yaitu; lamanya hidup, tingkat pendidikan dan tingkat kehidupan yang layak. Lamanya hidup diukur dengan harapan hidup waktu lahir, tingkat pendidikan diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah, sedangkan tingkat kehidupan yang layak diukur dengan besarnya pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan. Sebelum proses penghitungan IPM dilakukan, masing-masing variabel terlebih dahulu dihitung indeksnya sehingga bernilai 0 (untuk keadaan terburuk) atau bernilai 1 untuk keadaan terbaik). Untuk komponen angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah digabung menjadi satu sebagai variabel pendidikan dengan perbandingan nilai dua per tiga untuk komponen angka melek huruf dan sepertiga untuk komponen rata-rata lama

sekolah. Secara umum penyusunan indeks tersebut dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Indeks; } x(i) = \frac{\{x(i) - x(i)\ \min\}}{\{x(i)\ \max - x(i)\ \min\}}$$

$i = 1, 2, 3$ dst

IPM merupakan nilai rata-rata sederhana dari ketiga indeks tersebut di atas dengan formula sebagai berikut:

$$\text{IPM} = \frac{1}{3}\ [\ X1 + X2 + X3\ ]$$

Dimana:

X1 = Indeks Harapan Hidup

X2 = Indeks Pendidikan ($\frac{2}{3}$ indeks melek huruf + $\frac{1}{3}$ indeks rata-rata lama sekolah)

X3 = Indeks Konsumsi

D. Formulasi Penghitungan Pencapaian Nilai IPM

IPM dihitung sebagai porsi pencapaian terhadap target. Setelah diperoleh nilai elastisitas pengeluaran pemerintah Kota Metro terhadap nilai IPMnya, maka implementasi dari nilai tersebut dapat kita ukur dengan formula pencapaian terhadap target sebagai berikut :

IPM dihitung sebagai porsi pencapaian terhadap target :

$$\text{Indeks Dimensi} = \frac{\text{Pencapaian}}{\text{Target}}$$

$$= \frac{(\text{Kondisi Aktual} - \text{Kondisi Terburuk})}{(\text{Kondisi Ideal} - \text{Kondisi Terburuk})}$$

$$\text{IPM} = \frac{1}{3}\,(\text{Indeks X1} + \text{Indeks X2} + \text{Indeks X3})$$

E. Harapan Hidup

Salah satu unsur dalam upaya pembangunan manusia adalah untuk lebih mengupayakan agar penduduk dapat mencapai usia hidup yang panjang dan sehat. Sebenarnya banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur usia hidup, tetapi dengan pertimbangan ketersediaan data maka secara umum UNDP memilih variabel angka harapan hidup waktu lahir *(life expectancy at birth)* yang biasa disebut dengan symbol *eo***.** Angka kematian bayi *(infant mortality rate)* tidak digunakan untuk keperluan ini dinilai tidak peka bagi Negara-negara industri yang telah maju. Angka harapan hidup sebenarnya merefleksikan keberhasilan keseluruhan tingkat pembangunan bukan hanya di bidang kesehatan saja. Untuk Negara yang tidak memiliki sistem registrasi vital yang baik, seperti Indonesia angka harapan hidup dihitung dengan metode tidak langsung *(indirect methode).*

F. Pendidikan

Selain usia hidup, pengetahuan juga diakui secara luas sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia. Dengan pertimbangan ketersediaan data, variabel pengetahuan diukur dengan dua indikator yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Kedua indikator ini dianggap telah dapat menggambarkan tingkat pengetahuan dan keterampilan. Semakin banyak penduduk yang melek huruf dan makin lama mengikuti pendidikan sekolah diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas masyarakat dalam menguasai ilmu pengetahuan maupun keterampilan yang dimiliki. Angka melek huruf diperoleh dari persentase penduduk usia 15

tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis. Sedangkan untuk menghitung rata-rata lama sekolah menggunakan metode tidak langsung.

Metode Penghitungan Indikator Pendidikan dilakukan sebagai berikut:

$$\text{Angka Partisipasi Kasar SD} = \frac{\text{Jumlah penduduk sekolah di SD}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun}} \text{X } 100\%$$

$$\text{Angka Partisipasi Kasar SMP} = \frac{\text{Jumlah penduduk sekolah di SMP}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun}} \text{X } 100\%$$

$$\text{Angka Partisipasi Kasar SMA} = \frac{\text{Jumlah penduduk sekolah di SMA}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 - 18 tahun}} \text{X } 100\%$$

$$\text{Angka Partisipasi Murni SD} = \frac{\text{Jumlah usia 7 - 12 tahun sekolah di SD}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun}} \text{X } 100\%$$

$$\text{Angka Partisipasi Murni SMP} = \frac{\text{Jumlah usia 13 - 15 tahun sekolah di SMP}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun}} \text{X } 100\%$$

$$\text{Angka Partisipasi Murni SMA} = \frac{\text{Jumlah usia 13 - 15 tahun sekolah di SMA}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 - 18 tahun}} \text{X } 100\%$$

$$\text{Angka Melek Aksara} = \frac{\text{Jumlah usia 15 th keatas melek huruf}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas}} \text{X } 100\%$$

$$\text{Angka Buta Aksara} = \frac{\text{Jumlah usia 15 th ke atas yang buta aksara}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas}} \text{X } 100\%$$

Angka buta aksara = 100% - Angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas.

G. Daya Beli

Setelah usia hidup dan pengetahuan, unsur dasar pembangunan manusia yang diakui secara luas adalah standar hidup layak. Banyak indikator alternatif yang dapat digunakan untuk menghitung unsur standar hidup layak. Dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara internasional, maka UNDP memilih GDP perkapita riil yang telah disesuaikan sebagai indikator standar hidup layak.

Rumus Atkinson yang digunakan untuk penyesuaian rata-rata konsumsi riil secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$
\begin{aligned}
D(I)^* &= D(i) && \text{jk } D(i) \leq Z \\
&= Z + 2\,(D(i) - Z)1/2 && \text{jk } Z < D(i) \leq 2Z \\
&= Z + 2\,(Z)1/2 + 3(D(i) - 2Z)1/3 && \text{jk } 2Z < D(i) \leq 3Z \\
&= Z + 2(z)1/2 + 3\,(Z)1/3 + 4(D(i) - 3Z)1/4 && \text{jk } 3Z < D(i) \leq 4Z
\end{aligned}
$$

Dimana :

D = Konsumsi perkapita riil yang telah disesuaikan dengan PPP/Unit (hasil tahapan 6)

Z = Threshold atau tingkat pendapatan tertentu yang digunakan sebagai batas kecukupan (Biasanya menggunakan garis kemiskinan yang dalam perhitungan ini nilai Z ditetapkan sebesar Rp.1.500,- perkapita sehari atau Rp.547.500,- perkapita setahun).

H. Komponen IPM

Komponen IPM meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan paritas daya beli adapun masing-masing komponen tersebut yaitu:

1. Angka Harapan Hidup

   Angka harapan hidup secara konsep diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat dijalani seseorang hingga akhir hayatnya. Angka ini sebetulnya dapat dihitung dengan menggunakan tabel kematian *(life table)*, namun karena data kematian menurut kelompok umur tidak tersedia maka cara ini tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu angka harapan hidup dapat dihitung dengan metode tidak langsung.

2. Angka Melek Huruf

   Merupakan salah satu indikator output di bidang pendidikan yang memberikan gambaran kualitas sumberdaya manusia.

3. Rata-rata Lama Sekolah

   Selain angka melek huruf, indicator pendidikan lainnya digunakan dalam penghitungan IPM adalah rata-rata lama sekolah. Indikator ini memberikan gambaran tentang rata-rata lamanya waktu yang telah ditempuh oleh penduduk dalam mengikuti pembelajaran formal. Populasi yang digunakan dalam menghitung rata-rata lama sekolah adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas.

4. Paritas Daya Beli

   Indikator ini memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat dalam mengakses sumberdaya ekonomi dalam arti luas. Semakin meningkat pendapatan seseorang diharapkan paritas daya belinya juga semakin meningkat. Namun demikian hubungan ini tidak selalu benar, terutama bila tingkat kenaikan pendapatan masih lebih rendah dari tingkat kenaikan harga secara umum (BPS dan Bappeda Kota Metro, *2006*: 21*)*

I. Indeks Pembangunan Sosial *(Social Development Index/SDI)*

Michael P. Todaro (1999 :73) menguraikan bahwa pada dasarnya berbagai indikator alternatif itu dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu yang mencoba mengukur pembangunan berdasarkan pola interaksi “normal atau optimal” antara berbagai faktor sosial, ekonomi dan politik, serta mencoba mengukur pembangunan dalam kerangka kualitas hidup.

Salah satu riset PBB untuk pembangunan sosial *(UNRISD, United Nations Research Institute on Social Development)* pada tahun 1970. Studi tersebut dimaksudkan untuk memilih indikator-indikator yang paling layak untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan, sekaligus menganalisis hubungan antara berbagai indikator tersebut pada berbagai tingkat kemajuan pembangunan. Hasilnya adalah apa yang kini dikenal dengan Indeks Pembangunan Sosial *(Social Development Index).*

J. Indeks Kualitas Hidup Fisik *(PQLI, Physical Quality of Life Index)*

Michael P. Todaro (1999:74) mengatakan salah satu usaha "pembumian" indikator pembangunan yang paling dikenal adalah yang dilakukan oleh Morris D. Morris yang berhasil merumuskan sebuah indeks gabungan baru yang disebut dengan Indeks Kualitas Hidup Fisik *(PQLI).* Ada tiga indikator yaitu; tingkat harapan hidup pada usia satu tahun, tingkat kematian bayi dan tingkat melek huruf yang digunakan untuk membentuk indeks gabungan yang relatif sederhana ini.

K. Hubungan *Government Expenditure* dengan *Human Development*

Studi Ramirez dkk (1998) berangkat dari terdapatnya hubungan dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia (*human development*). Dengan cara lain, Hers (1998) juga menyebutkan adanya persoalan simultanitas dalam model empiris yang banyak digunakan dalam studi-studi yang mengestimasi pengaruh modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun kedua rantai hubungan yang dimaksud oleh Ramirez dkk adalah sebagai berikut:

Pertama adalah dari pertumbuhan ekonomi ke pembangunan manusia. Kinerja ekonomi mempengaruhi pembangunan manusia, khususnya melalui aktivitas

rumah tangga dan pemerintah, selain adanya peran *civil society* seperti melalui organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.

Alokasi antar dan dalam lembaga tersebut dan perbedaan perilakunya dapat menjadi penyebab perbedaan kinerja pembangunan manusia sekalipun tingkat kinerja ekonominya setara. Kecenderungan rumah tangga untuk membelanjakan pendapatan bersih mereka untuk barang-barang yang memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia (seperti makanan, air, pendidikan dan kesehatan) tergantung dari sejumlah faktor seperti tingkat dan distribusi pendapatan antar rumah tangga dan juga pada siapa yang mengontrol alokasi pengeluaran dalam rumah tangga. Sementara itu perempuan juga memiliki andil yang tidak kecil dalam mengatur pengeluaran rumah tangga. Makin tinggi pendidikan perempuan akan makin positif pula bagi pembangunan manusia.

Sehubungan dengan itu dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia ditentukan bukan hanya oleh tingkat pendapatan, tetapi juga oleh distribusi pendapatan dalam masyarakat termasuk peran perempuan dan peran pemerintah. Alokasi sumberdaya untuk pembangunan manusia dari sisi pemerintah tersebut merupakan fungsi dari tiga hal, yaitu; total pengeluaran sektor pemerintah, berapa banyak yang dialihkan untuk sektor-sektor pembangunan manusia, dan bagaimana dana tersebut dialokasikan dalam sektor sosial tersebut. Adapun peran organisasi LSM sendiri umumnya sebagai pelengkap, hanya di sejumlah Negara tampak sangat dominan karena menjadi pendorong terpenting bagi pembangunan manusia.

Adapun jalur kedua, dari pembangunan manusia ke pertumbuhan ekonomi. Mengenai hubungannya relatif sudah banyak diungkapkan. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi akan mempengaruhi perekonomian melalui peningkatan

kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah juga pada produktifitas untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi ataupun inovasi teknologi menjadi mungkin untuk terjadi. Begitu pula modal sosial akan meningkat seiring dengan tingginya pendidikan. Tentu dalam hal ini juga penting adanya investasi dan juga distribusi pendapatan. Dengan distribusi pendapatan yang baik membuka kemungkinan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Hal ini dikarenakan dengan meratanya distribusi pendapatan maka tingkat kesehatan dan pendidikan akan lebih baik dan pada gilirannya juga akan memperbaiki tingkat produkstifitas tenaga kerja. Sementara itu investasi juga memungkinkan sumberdaya manusia untuk bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, pengaruh pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi akan lebih meyakinkan jika memang sudah ada kebiasaan untuk mendukung pendidikan yang baik yang mana tergantung pada tahapan pembangunan itu sendiri. Selain itu, pengaruh positif itu juga jika terdapat tingkat investasi yang tinggi, distribusi pendapatan lebih merata, dukungan untuk modal sosial yang lebih baik serta kebijakan ekonomi yang lebih memadai.

Pernyataan-pernyataan itu kurang lebih sejalan dengan pendapat Ramirez dkk (1998) yang dari studi *cross-country* mereka menemukan bukti adanya hubungan positif dan kuat pada kedua jalur hubungan pembangunan manusia dan petumbuhan ekonomi. Ditambahkan pula bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor sosial dan pendidikan perempuan penting artinya dalam memperkuat hubunganpertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia, sementara

tingkat investasi dan distribusi pendapatan memperkuat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia.

Secara empiris, Garcia dan Soelistianingsih (1998) telah mengestimasi pengaruh variabel modal manusia (diukur dengan pangsa penduduk umur 10 tahun ke atas yang berpendidikan tingkat dasar dan menengah), rasio murid terhadap guru (untuk mengukur *coverage* upaya pendidikan dan efisiensi penggunaan sumberdaya untuk pendidikan), fertilitas total (jumlah rata-rata anak yang lahir untuk setiap perempuan berumur 15 sampai 49 tahun) selain pangsa sector minyak dan gas dalam PDRB untuk mengukur ketersediaan sumberdaya alam terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Temuannya adalah bahwa investasi untuk pendidikan dan kesehatan memang dibutuhkan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan regional.

Sedangkan Wibisono (2001) memasukkan variabel-variabel *educational attaintment* (diukur dengan tingkat pendidikan yang berhasil ditamatkan), angka harapan hidup*(life expectancy)*, tingkat fertilitas *(fertility rate)*, tingkat kematian bayi *(infant mortality rate)*, laju inflasi dan juga variabel *dummy* regional juga terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Dari estimasi-estimasi yang dilakukan, diperoleh temuan bahwa variabel yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan adalah pendidikan, angka harapan hidup, dan tingkat kematian bayi. Sedangkan tingkat fertilitas dan laju inflasi memberikan efek negatif terhadap tingkat pertumbuhan pendapatan.Hal ini jelas mengkonfirmasi bahwa modal manusia *(human capital)* dalam bentuk pendidikan maupun kesehatan mempunyai kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi dan berarti juga berguna untuk mempercepat proses pemerataan pendapatan daerah.

L. Kesejahteraan Manusia

Dikatakan masyarakat sejahtera menurut Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 1992 adalah jika masyarakat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pendidikan, indikatornya antara lain; tingkat pendidikan, tingkat melek huruf, tingkat partisipasi pendidikan.
2. Kesehatan, indikatornya; fasilitas kesehatan, hari-hari sakit.
3. Perumahan, indikatornya; sumber air bersih dan listrik, sanitasi, mutu rumah tinggal.
4. Angkatan kerja, indikatornya; partisipasi tenaga kerja, jumlah jam kerja,
5. sumber penghasilan utama, status pekerjaan.
6. Keluarga berencana dan fertilitas, indikatornya penggunaan ASI, tingkat imunisasi, kehadiran tenaga kesehatan
7. Ekonomi, khususnya tingkat pendapatan per kapita
8. Kriminalitas, indikatornya; jumlah pencurian per tahun, jumlah pembunuhan per tahun, jumlah perkosaan per tahun.
9. Perjalanan Wisata, indikatornya perjalanan wisata per tahun.
10. Akses Media Massa, indikatornya; jumlah surat kabar, jumlah radio, jumlah televisi.

M. Indikator-Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Beckerman (1998:126) membedakan tingkat kesejahteraan masyarakat, dalam tiga kelompok yaitu:

1. Kelompok Pertama

   Merupakan usaha membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di dua atau beberapa negara dengan cara memperbaiki cara-cara yang dilaksanakan

dalam penghitungan pendapatan nasional. Usaha ini dipelopori oleh Colin Clark dan selanjutnya disempurnakan oleh Gilbert dan Kravis.

2. Kelompok Kedua

   Adalah usaha untuk membuat penyesuaian dalam pendapatan masyarakat yang dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga di tiap negara.

3. Kelompok Ketiga

   Usaha untuk membuat perbandingan tingkat kesejahteraan masyarakat dari setiap negara berdasarkan pada data yang tidak bersifat moneter *(non-monetery indicators)* seperti jumlah kendaraan bermotor, konsumsi minyak, jumlah penduduk bersekolah dan sebagainya. Usaha ini dipelopori oleh Bennet. Menurut Beckerman (1998:154) dari berbagai cara di atas, cara yang dilakukan oleh Gilbert dan Kravis adalah cara yang paling sempurna. Cara ini merupakan usaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan dan pembangunan di beberapa negara dengan memperbaiki metode perbandingan pendapatan nasional dari masing-masing negara.

Usaha lain dalam menentukan dan membandingkan kesejahteraan antar negara telah dilakukan oleh *United Nation Research for Social Development* (UNRISD), yang berpusat di Jenewa Swiss tahun 1980. Dalam penelitian tersebut yang dilakukan adalah menciptakan indeks taraf pembangunan dari negara-negara maju dan NSB berdasarkan pada sifat dari 18 jenis data berikut:

1. Tingkat harapan hidup *(life expectancy)*
2. Persentase PDB yang berasal dari industri pengolahan *(manufacturing)*
3. Konsumsi energi per kapita

4. Konsumsi listrik per kapita
5. Konsumsi baja per kapita
6. Nilai per kapita perdagangan luar negeri
7. Produk pertanian
8. Pendapatan per kapita Produk Nasional Bruto (PNB)
9. Persentase anak-anak yang belajar di sekolah dasar dan menengah
10. Persentase anak-anak yang belajar di sekolah kejuruan
11. Jumlah surat kabar
12. Jumlah telepon
13. Jumlah Radio
14. Jumlah penduduk di kota-kota yang mempunyai 20.000 penduduk atau lebih.
15. Konsumsi protein hewani per kapita
16. Persentase laki-laki dewasa yang bekerja di sector pertanian
17. Persentase tenaga kerja (dari keseluruhan tenaga kerja)

N. Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, Morris D. Morris (1995:86) mengenakan PQLI atau Indeks Kualitas Hidup atau yang telah dikembangkan oleh UNDP tahun 1990 lebih dikenal dengan HDI. Sampai tahun 1996, tingkat pembangunan manusia regional di Indonesia dinilai cukup impresif seperti tampak dari berkurangnya kemiskinan dan ketimpangan sampai pada membaiknya tingkat harapan hidup dan melek huruf (BPS-Bappenas-UNDP, 2001). Namun capaian tersebut segera mendapatkan tantangan ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997. Ditambahkan pula bahwa hal yang paling tampak dan kemudian berpengaruh kepada IPM melalui komponen pengeluaran per kapita adalah

membumbungnya tingkat inflasi sementara upah riil menurun sehingga daya beli masyarakat terpuruk. Harga-harga kebutuhan rumah tangga meningkat drastis disertai pula dengan turunya pendapatan masyarakat akibat pengurangan jam kerja dan peningkatan jumlah pengangguran sehingga daya beli masyarakat pun anjlok dan merubah pola konsumsi masyarakat (Rafinus, Lukman, Djaja, 2000).

Salah satu aspek strategis dan menentukan dalam mewujudkan masyarakat yang madani adalah pemanfaatan secara optimal sumberdaya manusia bagi pembangunan masyarakat. Untuk mencapai kualitas SDM yang mampu mendukung pembangunan, diperlukan pendidikan yang terselenggara secara sistematik dan diarahkan langsung bagi pembebasan jiwa dari kesempitan berpikir serta takut dalam upaya mencerdaskan rakyat.

Akibat krisis, tidak ada satu propinsi pun yang tidak mengalami penurunan IPM bahkan sejumlah propinsi mengalami kemerosotan tajam sehingga IPM 1999 menjadi lebih rendah daripada IPM 1990 (Brata, 2002). Komponen-komponen lain dari IPM pada umumnya masih mengalami peningkatan ini menjadi tidak mampu menolong untuk mempertahankan IPM karena “tenggelam” oleh tajamnya penurunan daya beli beli masyarakat. Kendati demikian yang cukup menguntungkan adalah bahwa aspek pendidikan cukup tertolong oleh karena meningkatnya persepsi masyarakat baik kaya maupun miskin akan pentingnya pendidikan (Oey-Gardiner, 2000). Tahun 2002 IPM telah mengalami perbaikan, namun perbaikan tersebut pada umumnya belum mampu menyamai tingkat IPM tahun 1996. Hanya beberapa propinsi saja yang IPM tahun 2002 cukup mendekati IPM tahun 1996, seperti DKI Jakarta dan Sulawesi Utara.

O. Kelemahan IPM

Sama halnya dengan GNP per kapita, tidak terbebas dari kelemahan dan kritik. Sejumlah ekonom akademik berpendapat bahwa asumsi-asumsi yang dianut oleh HDI seperti pengikisan nilai marjinal pendapatan uang diatas angka rata-rata dunia terlalu berlebihan sehingga taksiran-taksiran HDI acap kali tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

Mereka juga berpendapat bahwa metodologi statistik dasar yang digunakan dalam penyusunan HDI terlalu longgar dalam menggunakan data sehingga data-data yang tidak layak atau akurat acapkali juga dimasukkan sehingga perbandingan antara negara dan pengukuran tingkat kemajuan pembangunan yang ditunjukkan oleh angka HDI sulit dipercaya.